

KRITIK PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN DPR STUDI KASUS DEMONSTRASI NASIONAL 25-29 AGUSTUS 2025

Kaharuddin¹, Ferlian Luri Sasta Zega², Marsya Keisya Gunawan³, Voleta Istiqomah⁴
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email : kaharuddin@upnvj.ac.id, 2510611046@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2510611067@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611073@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji demonstrasi nasional 25-29 Agustus 2025 sebagai bentuk kritik publik terhadap kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta bagi anggota dewan. Aksi tersebut mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap elitis dan tidak peka terhadap kondisi sosial-ekonomi. Menggunakan teori efektivitas organisasi Steers (1986) dan menggunakan metode studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti berita, laporan resmi, kajian akademik, regulasi, serta dokumentasi digital mengenai demonstrasi dan kebijakan DPR. penelitian ini menilai sejauh mana kebijakan DPR memenuhi tujuan dan mempertahankan legitimasi politiknya. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan DPR belum efektif karena tidak responsif terhadap aspirasi publik dan kurang transparan. Penelitian ini menegaskan peran kritik publik sebagai mekanisme kontrol sosial dalam demokrasi serta memberikan masukan bagi penguatan kebijakan yang lebih partisipatif dan berkeadilan di Indonesia.

Kata kunci : Kebijakan DPR, Legitimasi politik, Transparansi

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 526

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Aksi demonstrasi adalah cara untuk menyampaikan pendapat atau pandangan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Tujuannya adalah untuk menunjukkan dukungan terhadap suatu maksud atau tujuan tertentu. Demonstrasi nasional yang terjadi pada 25 Agustus 2025 adalah momen penting dalam dinamika politik Indonesia karena menunjukkan peningkatan kritik publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan dan wacana yang dianggap tidak menguntungkan rakyat, terutama di tengah situasi sosial-ekonomi yang semakin memburuk. Rencana untuk memberikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan kepada anggota DPR adalah salah satu masalah yang menimbulkan kemarahan. ini dianggap terlalu besar untuk orang-orang yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Orasi diucapkan secara acak dan aksi berlangsung secara spontan. Dimulai dengan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR di Jakarta untuk menuntut pembatalan usulan tunjangan tersebut, demonstrasi ini kemudian menyebar ke berbagai kota besar seperti Bandung, Medan dan Surabaya. Menurut para masyarakat, perwakilan rakyat tidak memenuhi harapan mereka. Beberapa anggota DPR pun yang dianggap meremehkan atau mengabaikan keadilan publik membuat pernyataan kontroversial bahkan ketika mereka berbicara dan saat tuntutan muncul

pun tidak ada diskusi yang konstruktif. Situasi menjadi lebih sulit setelah insiden yang membunuh pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang terlindas oleh kendaraan taktis aparat.

Peristiwa ini meningkatkan kerja sama kelompok masyarakat dan menunjukkan ketidakadilan. Pada awalnya, demonstrasi berjalan tenang tetapi kemudian berubah menjadi kekacauan beberapa kali. Termasuk bentrokan dengan polisi, pembakaran fasilitas publik, dan penjarahan ke rumah para anggota DPR seperti Eko Patrio, Uya Kuya dan pejabat pemerintah seperti menteri keuangan Sri Mulyani. Beberapa waktu terakhir orang-orang ini telah menarik perhatian publik karena berbagai pernyataan kontroversial yang telah mereka buat. Media sosial juga merupakan hal yang penting karena untuk menyebarkan informasi, membentuk opini publik dan memobilisasi massa dalam waktu singkat. Cerita tentang gaya hidup mewah anggota DPR dikombinasikan dengan kondisi masyarakat yang semakin terhimpit meningkatkan kemarahan masyarakat dan mempercepat eskalasi protes.

Karena keadaan ini, demonstrasi di DPR pada tahun 2025 merupakan lebih dari sekedar tanggapan spontan terhadap masalah tunjangan. Itu adalah bukti kekecewaan kolektif terhadap kebijakan ekonomi yang tidak adil, kekuasaan politik yang tidak kuat dan ketidakadilan dalam pembagian kesejahteraan. Kondisi ini menunjukkan bentuk representasi yang berbeda, dimana DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat dilihat lebih jauh dari kepentingan rakyat. Oleh karena itu, studi kasus demonstrasi nasional ini sangat penting untuk memahami kritik publik terhadap kebijakan DPR untuk memahami dinamika hubungan antara negara dan masyarakat. Hal ini juga penting untuk menemukan cara agar demokrasi dapat berjalan lebih baik dan berkeadilan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya demonstrasi nasional pada 25-29 Agustus 2025. Kejadian ini berakar pada meningkatnya kekecewaan publik terhadap kebijakan DPR yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat, terutama terkait dengan usulan tunjangan perumahan bagi anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil pada saat ini. Kebijakan tersebut itu pun dianggap mencerminkan ketimpangan sosial dan ketidakpekaan para elite politik terhadap kesulitan masyarakat, sehingga memicu berbagai protes dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, buruh, dan organisasi masyarakat sipil. Bentuk dan arah kritik publik terhadap kebijakan DPR pada saat itu cenderung mengarah pada penolakan terhadap praktik politik yang elitis dan tidak transparan, sehingga para masyarakat mengajukan tuntutan agar wakil rakyat lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta mengutamakan kebijakan yang bersifat inklusif dan berkeadilan sosial. Kritik tersebut disampaikan melalui berbagai saluran, mulai dari aksi massa di jalanan, media sosial, hingga pernyataan sikap dari lembaga-lembaga independen yang menyuarakan reformasi etika politik dan tata kelola anggaran negara. Dengan begitu respons pemerintah dan DPR terhadap tuntutan masyarakat terbilang beragam, di mana pemerintah berupaya meredam situasi dengan menghimbau para masyarakat dengan omongan dan menjaga ketertiban umum, sementara DPR menyatakan kesediaannya untuk meninjau kembali kebijakan terkait meski langkah tersebut dianggap sebagian pihak sebagai respons yang terlambat dan lebih bersifat reaktif daripada solutif. Dan pada akhirnya, penelitian ini dibuat agar dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintahan kepada masyarakat mengenai hubungan lembaga-lembaga di Indonesia dalam konteks demokrasi.

Urgensi Penelitian

"Kritik Publik terhadap Kebijakan DPR Studi Kasus Demonstrasi Nasional 25-29 Agustus 2025" sangat penting untuk memahami bagaimana hubungan antara DPR dan masyarakat sebagai pemegang hak cipta berkembang. Demonstrasi yang terjadi selama periode tersebut merupakan peristiwa politik yang menunjukkan ketidakpuasan publik dan perbedaan antara kebijakan yang ditetapkan DPR dan aspirasi rakyat. Akibatnya, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kritik masyarakat muncul, gaya komunikasi politik yang berkembang, dan penguatannya terhadap legitimasi lembaga legislatif di sistem demokrasi Indonesia.

Selain itu, penelitian ini terkait dengan peran yang akan dimainkannya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, adil, dan terlibat. Kritik publik melalui tekanan harus dilihat sebagai alat kontrol sosial yang dapat meningkatkan kebijakan. Penelitian ini harus dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana kritik publik dapat menjadi instrumen konstruktif untuk meningkatkan kualitas demokrasi di India dengan mempelajari secara ilmiah dinamika kritik publik untuk membantu DPR membuat kebijakan yang lebih responsif dan memperkuat peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi.

Manfaat Penelitian

memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam memahami dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur ilmu politik, hukum, dan komunikasi politik, khususnya terkait mekanisme kritik publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPR dalam merumuskan kebijakan yang lebih aspiratif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Selain itu, kajian ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat sipil, aktivis, dan organisasi non-pemerintah untuk menyusun strategi advokasi yang lebih efektif dalam menyuarakan kepentingan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi peristiwa politik, tetapi juga sebagai dasar rekomendasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia.

LITERATURE REVIEW

1. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep penting dalam penelitian sosial, kebijakan publik, dan manajemen karena berhubungan langsung dengan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. Secara umum, efektivitas didefinisikan sebagai seberapa baik suatu tindakan, kebijakan, program, atau organisasi dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dapat dianggap efektif jika hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Georgopoulos dan Tannenbaum (1957), efektivitas adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan sekaligus mempertahankan keseimbangan internal dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Yuchtman dan Seashore (1967) menambahkan bahwa efektivitas dapat diukur dari kemampuan organisasi memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang langka serta berharga dari lingkungannya. Etzioni (1964) berpendapat bahwa efektivitas organisasi

ditentukan oleh sejauh mana organisasi mampu memenuhi tuntutan internal dan eksternal secara seimbang.

Pandangan lain dikemukakan oleh Miles (1980) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Sementara itu, Likert (1961) menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan erat dengan hubungan manusia dalam organisasi, di mana efektivitas ditentukan oleh komunikasi yang baik, kepemimpinan partisipatif, serta kerjasama antar anggota. Barnard (1938) juga menegaskan bahwa efektivitas organisasi diukur dari sejauh mana tujuan kolektif dapat dicapai melalui kerjasama individu dalam organisasi. Lalu menurut, Katz dan Kahn (1978) yang menekankan bahwa efektivitas tidak hanya dilihat dari pencapaian tujuan, tetapi juga dari keberlangsungan sistem organisasi melalui proses input, transformasi, dan output. Sementara itu, Parsons (1960) menyebut bahwa efektivitas organisasi dapat dipahami melalui empat fungsi utama sistem sosial: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola (AGIL).

Untuk mengemukakan tolak ukur hasil efektivitas, maka diperlukan hal yang dapat mengukur efektivitas tersebut. Menurut Richard M. Steers (1986) secara lebih rinci menjelaskan bahwa efektivitas organisasi mencakup tiga dimensi utama:

1. Pencapaian Tujuan - efektivitas diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditentukan dapat direalisasikan. Organisasi dianggap efektif jika hasil akhir sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Pendekatan Sistem - efektivitas dilihat dari kemampuan organisasi untuk memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya dari lingkungan secara efisien agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.
3. Pendekatan Konstituen Strategis - efektivitas juga diukur dari sejauh mana organisasi mampu memenuhi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), baik internal maupun eksternal, seperti anggota, pimpinan, pelanggan, maupun masyarakat luas.

Penelitian ini akan memeriksa seberapa efektif kebijakan DPR berdasarkan ketiga faktor efektivitas di atas melalui demonstrasi nasional dari 25 hingga 29 Agustus 2025. Pertama, apakah kebijakan DPR dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang menentukan seberapa efektif kebijakan tersebut. kedua, efektivitas juga akan diperiksa dari sudut pandang waktu, yaitu apakah DPR menanggapi kritik publik dengan cepat dan tepat waktu atau menyebabkan pengambilan keputusan tertunda. Kebijakan dianggap efektif jika dapat mencapai tujuan mereka dengan tepat dan tepat waktu. ketiga, dasar hukum kebijakan DPR juga akan diperiksa untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan benar-benar menguntungkan rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demonstrasi nasional pada 25-29 Agustus 2025 merupakan bentuk nyata ekspresi kritik publik terhadap kebijakan DPR yang dinilai tidak aspiratif. Masyarakat memandang bahwa proses perumusan kebijakan cenderung elitis, tertutup, dan lebih mengutamakan kepentingan politik kelompok tertentu dibandingkan kepentingan rakyat secara luas. Partisipasi berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa,

akademisi, buruh, hingga organisasi masyarakat sipil, memperlihatkan bahwa kritik yang muncul bukan bersifat parsial, melainkan kolektif dan meluas. Hal ini menjadi indikasi kuat adanya krisis kepercayaan terhadap DPR sebagai lembaga representasi rakyat.

Lebih lanjut, pembahasan memperlihatkan bahwa kritik publik melalui demonstrasi berfungsi sebagai mekanisme koreksi sosial terhadap lembaga legislatif. Demonstrasi tersebut tidak hanya menolak substansi kebijakan tertentu, tetapi juga menyoroti lemahnya pola komunikasi politik, keterbatasan akses informasi publik, serta minimnya ruang partisipasi dalam proses legislasi. Kritik publik ini merefleksikan kebutuhan mendesak akan sistem legislasi yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif agar mampu merespons aspirasi masyarakat secara lebih adil. Dengan demikian, aksi demonstrasi dapat dipahami sebagai salah satu instrumen demokratis yang menegaskan peran rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPR perlu melakukan reformulasi strategi komunikasi politik serta memperluas kanal partisipasi publik dalam proses legislasi. Kritik publik seharusnya dipandang bukan semata ancaman terhadap stabilitas politik, tetapi sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Dengan adanya respons positif terhadap kritik tersebut, DPR dapat meningkatkan legitimasi kelembagaan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, demonstrasi nasional 25-29 Agustus 2025 dapat dijadikan refleksi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

KESIMPULAN

Demonstrasi nasional yang terjadi pada 25-29 Agustus 2025 menjadi gambaran nyata meningkatnya ketegangan antara masyarakat dan lembaga legislatif, khususnya DPR. Aksi tersebut tidak hanya dipicu oleh isu tunjangan perumahan yang dinilai berlebihan, tetapi juga mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak mewakili kepentingan rakyat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa DPR masih memiliki tantangan besar dalam menjalankan fungsi representasi dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai wakil rakyat.

Kritik yang disampaikan melalui aksi demonstrasi menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam proses kebijakan semakin meningkat. Selain itu, media sosial memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan menggerakkan partisipasi masyarakat secara luas. Jika ditinjau dari aspek efektivitas, kebijakan DPR dalam kasus ini belum menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan aspirasi masyarakat, baik dalam hal pencapaian tujuan, respon terhadap kritik, maupun pemenuhan kepentingan publik secara menyeluruh.

Dengan demikian, demonstrasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk peringatan bagi pemerintah dan DPR untuk lebih terbuka terhadap kritik serta memperkuat komunikasi publik yang partisipatif. Kritik publik seharusnya dipandang bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sarana pengawasan sosial dalam sistem demokrasi. Melalui evaluasi yang konstruktif, DPR diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan merumuskan kebijakan yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Salsabila, K. A., Anastasya, N., Saritza, Z., Simanjuntak, A. C., Nafis, M., Situmorang, K. R., ... & Annisa, S. (2025). 17+ 8 TUNTUTAN RAKYAT: KRISIS KEPERCAYAAN DAN REFORMASI DPR PADA ERA PRESIDEN PRABOWO. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(9), 16686-16695.
- Cahyati, F., Heridadi, H., Subiyanto, A., & Wilopo, W. (2025). PERILAKU TIDAK ETIS PEJABAT DAN KRISIS LEGITIMASI POLITIK INDONESIA 2025. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(11), 4336-4342.
- Arafat, M., & Mulyaningsih, R. (2025). KONSTITUSI, KEBEBASAN BERPENDAPAT, DAN DILEMA APARAT DALAM MENGHADAPI AKSI DEMONSTRASI: CONSTITUTIONAL GUARANTEES FOR DEMONSTRATORS AND THE PROPORTIONALITY TEST OF LAW ENFORCEMENT ACTIONS. *Jurnal Nomokrasi*, 3(2), 193-208.
- Febriansyah, G., & Khamid, A. (2025). Kebijakan Negara terhadap Demonstrasi Mahasiswa: Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum dan Sosial. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(5), 941-948.
- D NATION, 4(Aryanti, S., & Satory, A. (2025). JAMINAN KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE: STUDI KASUS PEMBERITAAN MEDIA NASIONAL DEMONSTRASI AKBAR DRIVER GRAB MEI 2025. *JOURNAL OF LAW AN2*), 539-555.
- Demo Agustus 2025: Alarm keras suara rakyat. (2025, Agustus). NU Online.
<https://nu.or.id/opini/demo-agustus-2025-alarm-keras-suara-rakyat-uCzCG>
- Refleksi Demo 25 Agustus dan antisipasi aksi lanjutan. (2025). Detik.com.
<https://news.detik.com/berita/d-8081738/refleksi-demo-25-agustus-dan-antisipasi-aksi-lanjuta>
- BAB III. (n.d.). Repository UIN Suska Riau.
<https://repository.uin-suska.ac.id/7271/4/BAB%20III.pdf>
- Detikcom. (2025, Agustus 30). Lini masa Demo Agustus 2025: Dari joget DPR hingga rumah Sahroni dijarah.
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-8088075/lini-masa-demo-agustus-2025-dari-joget-dpr-hingga-rumah-sahroni-dijarah>
- Tempo.co. (2025, Agustus 31). Kronologi demo memprotes DPR hingga meluas berubah penjarahan.
<https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>
- Detikcom. (2025, 30 Agustus). Lini masa demo Agustus 2025: Dari joget DPR hingga rumah Sahroni dijarah. Diakses dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8088075/lini-masa-demo-agustus-2025-dari-joget-dpr-hingga-rumah-sahroni-dijarah>
- Tempo.co. (2025, 31 Agustus). Kronologi demo memprotes DPR hingga meluas berubah penjarahan. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>
- CNBC Indonesia. (2025, 29 Agustus). Media asing sorot demo 28 Agustus di depan DPR RI, sebut ini. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250829064452-4-662366/media-asing-sorot-demo-28-agustus-di-depan-dpr-ri-sebut-ini>

Espos.id. (2025, 30 Agustus). Ini penyebab kemarahan rakyat berujung demo 25-29 Agustus 2025. Diakses dari <https://news.espos.id/ini-penyebab-kemarahan-rakyat-berujung-demo-25-29-agustus-2025-2136591>